

SKRIPSI
PENGARUH INISIATIF *EVERYTHING BUT ARMS* (EBA) TERHADAP
HUBUNGAN KAMBOJA – UNI EROPA



Disusun dan diajukan oleh

HASRI AINUN

E061171307

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH INISIATIF *EVERYTHING BUT ARMS* (EBA) TERHADAP
HUBUNGAN KAMBOJA – UNI EROPA**

OLEH:

HASRI AINUN

E061171307

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH INISIATIF *EVERYTHING BUT ARMS* (EBA)

TERHADAP HUBUNGAN KAMBOJA - UNI EROPA

N A M A : HASRI AINUN

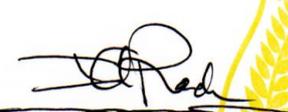
N I M : E061171307

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 April 2021

Pembimbing I,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH INISIATIF *EVERYTHING BUT ARMS* (EBA)
TERHADAP HUBUNGAN KAMBOJA - UNI EROPA

N A M A : HASRI AINUN

N I M : E061171307

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 23 April 2021.

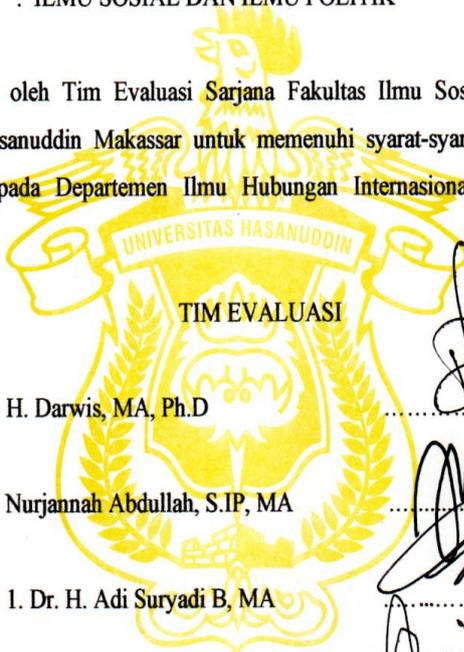
Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si



[Handwritten signatures of H. Darwis, Nurjannah Abdullah, and Ishaq Rahman]

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasri Ainun
NIM : E061171307
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

PENGARUH INISIATIF *EVERYTHING BUT ARMS* (EBA) TERHADAP HUBUNGAN KAMBOJA – UNI EROPA

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 April 2021

Yang Menyatakan



Hasri Ainun

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan segala puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkat, dan rahmat yang begitu berlimpah tercurah bagi penulis hingga hari ini. Tidak lupa pula salam dan shalawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan.

Dalam merampungkan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Inisiatif Everything But Arms (EBA) terhadap Hubungan Kamboja — Uni Eropa**” ini, banyak pihak yang terlibat dan penulis sangat mengapresiasi atas segala bantuan, *support*, dan doanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Keluarga penulis, Bapak **Ishak Rahim** dan Mama **Sumarni**, Bapak (kakek) **Alm. H.M. Asyha Asyik** dan Mama (nenek) **Ernawati Asyha**, serta kedua saudara penulis, **Zulkifli Fardhan Ishak** dan **Naura Safa Kamila**.

Dosen Pembimbing penulis, Pak **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.** selaku Pembimbing I dan Bu **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**, selaku pembimbing II. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, saran, dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dimana skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan kedua dosen pembimbing, terima kasih sekali lagi kepada Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya selama proses bimbingan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Para Dosen dan Staff Departemen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yaitu: **Pak H. Darwis, MA. Ph.D.**; **Pak Drs. Patrice Lumumba, M.A.**; **Pak Aswin Baharuddin, S.IP, M.A.**; **Bu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si.**; **Bu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D**; **Pak Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si.**; **Pak Dr. Adi Suryadi B, M.A.**; **Pak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D**; **Pak Burhanuddin, S.IP, M.Si.**; **Pak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si**; **Pak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**; **Pak Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si.**; **Pak Agussalim, S.IP, MIRAP.**; **Pak Bama Andika Putra, S.IP, MIR**; dan **Pak**

H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si., MIR. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, baik itu di ruang kelas maupun di luar ruang kelas, selama penulis mengemban pendidikan dalam hampir empat tahun terakhir. **Kak Rahma, Kak Tia, dan Bu Fatma,** terima kasih atas bantuannya dalam mengurus administrasi terutama dalam persiapan sidang.

Teman angkatan, **HI 2017** atau LIBERTE, **Nita, Tyas, Faiza, Ucil, Ucup, Novi, Faroq, Iun, Cici, Dian, Togar, Agal, Fadil, Sugi, Alief, Dion, Fara, Tia, Apro, Ainul, Alya, Andika, Uci, Thama, Daus, Isa, Uli, Kiki, Sri Reski, Ony, Mayang, Ulwi, Putri, Risna, Miftah, Pip, Rafli, Saf, Sita, Afil, Cini, Wardah, Winda, Wiwin, Wiz, Yayang, Danu, Dela, Imran, Febri, Emil,** dan teman-teman yang pernah menjadi bagian dari Liberte, terima kasih untuk kebersamaannya sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus.

Teruntuk **HIMAH FISIP UNHAS** yang telah menjadi salah satu ruang belajar dan berproses bagi penulis selama di kampus, terima kasih untuk semua cerita, tawa, bahagia, dan air mata.

Bayu Irsyada Pratama, S.IP, terima kasih sudah banyak membantu dan mendukung penulis dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga kebbaikannya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang mungkin namanya tidak sempat disebutkan di atas. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat ke depannya.

ABSTRAK

Hasri Ainun, E061171307, dengan judul skripsi “Pengaruh Inisiatif *Everything But Arms* (EBA) Terhadap Hubungan Kamboja – Uni Eropa” di bawah bimbingan Ishaq Rahman, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inisiatif EBA terhadap hubungan Kamboja dan Uni Eropa di bidang ekonomi dan politik. Dalam mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data berbasis telaah pustaka (*library research*) yang kemudian menghimpun data sekunder. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif EBA berpengaruh terhadap hubungan Kamboja dan Uni Eropa di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, inisiatif EBA berperan sebagai katalis dalam meningkatkan perdagangan keduanya, utamanya Kamboja sebagai penerima preferensi EBA yang bebas mengakses pasar UE. Di bidang politik, hubungan Kamboja dan UE mengalami degradasi ketika UE memutuskan untuk menarik sebagian preferensi EBA di Kamboja karena masalah HAM dan demokrasi yang semakin memprihatinkan di Kamboja.

Kata Kunci: EBA, Preferensi Perdagangan, Perdagangan Ekspor, Kamboja, Uni Eropa

ABSTRACT

Hasri Ainun, E061171307, "The Influence of the Everything But Arms (EBA) Initiative on Cambodia and European Union Relations" supervised by Ishaq Rahman, S.IP, M.Si. and Nurjannah Abdullah, S.IP, MA, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to examine the influence of the EBA initiative on the economic and political relations between Cambodia and the European Union. In achieving these objectives, the author used a descriptive-analytic research method. The data collection technique used in this research is secondary data based on library research. The author analyzes the data using qualitative data analysis techniques that are supported by quantitative data with deductive writing methods.

The results of this study indicate that the EBA initiative has some effects on the economic and political relations between Cambodia and the European Union. In the economic field, EBA initiatives that act as a catalyst in increasing trade, especially Cambodia as the preference for EBA recipients who are free to access the EU market. On the political area, Cambodia-EU relations experienced a degrade when the EU decided due in part to the EBA's preference in Cambodia due to human rights and democracy issues which are increasingly concerning in Cambodia.

Keywords: EBA, Trade Preference, Export Trade, Cambodia, European Union

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ...	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perdagangan Internasional	15
B. Liberalisasi Perdagangan	24
C. <i>Generalized System of Preferences (GSP)</i>	32
BAB III INISIATIF <i>EVERYTHING BUT AMRS (EBA)</i> DAN HUBUNGAN KAMBOJA-UNI EROPA.....	39
A. Inisiatif <i>Everything But Arms (EBA)</i> Uni Eropa.....	39
B. Hubungan Kamboja dan Uni Eropa.....	48
BAB IV PENGARUH INISIATIF <i>EVERYTHING BUT ARMS (EBA)</i> TERHADAP HUBUNGAN KAMBOJA DAN UNI EROPA.....	62
A. Pengaruh Inisiatif <i>Everything But Arms (EBA)</i> terhadap Hubungan Ekonomi Kamboja dan Uni Eropa.....	62
B. Dampak Pemutusan Inisiatif <i>Everything But Arms (EBA)</i> terhadap Hubungan Politik Kamboja dan Uni Eropa.....	79

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Skema Preferensi Perdagangan dalam GSP UE.....	40
Tabel 2. Negara Penerima Program GSP UE	42
Tabel 3. Jumlah Impor UE dari Kamboja dan impor di bawah preferensi EBA pada tahun 2013-2018	68
Tabel 4. Nilai Impor UE-28 dari Kamboja pada periode Januari-Desember 2019 dan 2020.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	8
Gambar 2. Peta Least-Developed Countries atau Negara Penerima Preferensi EBA UE	44
Gambar 3. Kronologi Hubungan Kamboja dan UE dalam Kerangka Inisiatif EBA	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Arus perdagangan UE dengan Kamboja pada tahun 2009-2019.....	53
Grafik 2. Total Nilai Ekspor Kamboja ke Uni Eropa pada tahun 2002-2019.....	55
Grafik 3. Perbandingan PDB UE dan Kamboja pada tahun 2000-2019 (\$M).....	63
Grafik 4. Total nilai ekspor tahunan Kamboja ke UE pada tahun 2001-2019 (\$M)	64
Grafik 5. Ekspor Kamboja berdasarkan HS pada tahun 2006 dan 2016.....	65
Grafik 6. Jumlah ekspor garmen Kamboja ke pasar UE dan AS pada tahun 2005- 2015.....	67
Grafik 7. Destinasi Ekspor Kamboja pada tahun 2006 dan 2016	68
Grafik 8. PDB per kapita dan pertumbuhan PDB tahunan Kamboja.....	70
Grafik 9. Arus Masuk FDI di Kamboja dari UE pada tahun 2013-2019	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Kamboja dengan Uni Eropa (UE) pertama kali terjalin di bawah kerangka Perjanjian Kerja Sama UE-ASEAN. Dimana hubungan bilateral antara kedua organisasi regional tersebut secara resmi dimulai sejak tahun 1977, bahkan sebelum Kamboja bergabung sebagai negara anggota ASEAN pada 30 April 1999. Sebagai negara anggota ASEAN, Kamboja juga turut menikmati manfaat dari kerjasama regional tersebut karena UE bekerja sama dengan ASEAN secara keseluruhan. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa Kamboja masih dikategorikan sebagai negara paling kurang berkembang atau *Least Developed Countries (LDCs)* bersama dengan dua negara lainnya di kawasan.

Salah satu hal yang menarik dari hubungan bilateral antara Kamboja dan UE yaitu, status Kamboja sebagai LDC dan preferensi perdagangan khusus yang diberikan UE terhadap negara berkembang. Status Kamboja sebagai LDC membawa Kamboja sebagai salah satu negara penerima manfaat dari rezim yang paling menguntungkan yang tersedia di bawah *Generalized Scheme of Preferences (GSP)* UE, yakni skema *Everything But Arms (EBA)*.

UE telah memberlakukan tarif preferensi terhadap negara berkembang melalui GSP sejak tahun 1971 (Tanaka, 2020). UE membentuk GSP dengan tujuan membantu negara-negara berkembang yang rentan dalam upaya mereka untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan tata kelola pemerintahan yang

baik, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana ketiga hal tersebut merupakan masalah yang umum terjadi di negara-negara berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, GSP memberi negara berkembang akses preferensial ke pasar UE untuk membantu mereka menghasilkan pendapatan tambahan melalui perdagangan internasional. Melalui pendapatan ekspor tambahan, GSP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang (European Parliament, 2018).

Terdapat tiga program preferensi perdagangan UE untuk negara berkembang, yaitu GSP standar, GSP+, dan EBA. Preferensi yang paling dermawan di antara ketiga program tersebut adalah skema EBA. Skema ini memberikan akses bebas bea penuh dan bebas kuota untuk semua produk kecuali senjata dan amunisi dan ditujukan untuk negara-negara yang diklasifikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai LDCs (European Parliament, 2018). Preferensi ini dapat ditarik jika terjadi beberapa keadaan luar biasa, terutama jika terjadi pelanggaran serius dan sistematis terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi hak asasi manusia dan hak buruh (European Commission, n.d.).

Sejak status EBA diberikan kepada Kamboja pada tahun 2001, skema tersebut telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. Setelah terjebak selama hampir tiga dekade (1970-2000) dalam tarik-menarik geopolitik Perang Dingin yang lebih luas, Kamboja mulai menyaksikan investasi asing berdatangan, terutama di industri garmen, alas

kaki, dan sepeda. Hasilnya, beberapa kemajuan ekonomi yang luar biasa telah dicapai dalam 20 tahun terakhir (Pouget, 2020).

Dapat dikatakan bahwa Kamboja telah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Preferensi perdagangan EBA yang diberikan oleh UE telah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Kamboja. Kamboja sekarang adalah penerima manfaat terbesar kedua dari preferensi EBA setelah Bangladesh. Bahkan, pasar UE telah menjadi tujuan ekspor terbesar Kamboja sejak tahun 2013 setelah menggeser Amerika Serikat. Pada tahun 2018, 45% dari total ekspor Kamboja ditujukan pada pasar UE (European Commission, 2020). Pendorong utama peningkatan ini adalah ekspor garmen. Dimana pada tahun 2017, garmen menyumbang sebesar 74,6% dari total ekspor Kamboja ke UE (ITC, 2020).

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa terjadi dinamika dalam hubungan Kamboja dengan UE, utamanya dalam kerangka inisiatif EBA. Hubungan bilateral antara Kamboja dengan UE saat ini tengah menghadapi tantangan sejak UE memulai proses internal untuk menarik skema perdagangan EBA dari Kamboja. Sebagaimana preferensi tersebut dapat ditarik jika terjadi beberapa keadaan luar biasa, terutama jika terjadi pelanggaran serius dan sistematis terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi hak asasi manusia dan hak buruh yang mendasar (European Commission, n.d.). Sejak tahun 2019, Komisi Eropa sepakat untuk memulai prosedur penarikan sementara preferensi perdagangan EBA yang diberikan kepada Kamboja karena terdapat cukup bukti yang menunjukkan pelanggaran serius dan sistematis terhadap hak asasi

manusia dan hak buruh (European Commission, 2020). UE percaya bahwa demokrasi dan situasi hak asasi manusia di Kamboja telah memburuk sejak 2017. Komisi Eropa telah mempertimbangkan penarikan tersebut selama setahun setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang telah memerintah selama 35 tahun, kembali menjabat dan melarang satu-satunya partai oposisi yang layak di negara itu untuk menuntut kepemimpinannya (Tulonen, 2020).

Hingga pada Agustus 2020, UE melalui Komisi Eropa telah memutuskan untuk mencabut sebagian akses bebas bea dan bebas kuota Kamboja ke pasar UE. Beberapa produk ekspor khas Kamboja seperti garmen, alas kaki, dan *travel goods* merupakan produk-produk yang terdampak dari penarikan EBA yang kemudian akan dikenakan tarif standar UE. Keputusan UE untuk mencabut sebagian akses bebas bea Kamboja yang bebas kuota ke pasar UE sekarang telah bekerja efektif (European Commission, 2020).

Kamboja menilai langkah UE sebagai ketidakadilan yang ekstrim dan terdapat standar ganda dalam perlakuannya terhadap Kamboja (Heng, 2019). Mengingat bahwa terdapat penerima EBA lainnya dengan catatan HAM yang buruk, namun tidak mengalami hal serupa. Pemerintah Kamboja menganggap hal tersebut merupakan campur tangan asing yang merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara dan stabilitas politik di Kamboja (Pouget, 2020). Dengan ini, Kamboja menegaskan bahwa mereka tidak akan berkompromi pada masalah prinsip nasional untuk menghindari sanksi UE dan bersiap untuk kehilangan 20% dari hak istimewa preferensi EBA melalui langkah-langkah

untuk membantu pekerja pabrik garmen dan masyarakat yang akan terkena dampak (Associated Press, 2020).

Perlakuan istimewa yang dinikmati Kamboja di bawah inisiatif EBA kini telah dicabut untuk sementara karena masalah serius dan sistematis terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dipastikan terjadi di negara tersebut. Penarikan akses preferensial ke pasar UE diperkirakan akan menyangkut sekitar 20% dari ekspor Kamboja ke UE (sekitar 75% di antaranya terdiri dari garmen). Diperkirakan kerugian yang akan dialami Kamboja bernilai sekitar US \$ 1,1 miliar dari total ekspor tahunannya ke UE (European Commission, 2020).

Penarikan EBA UE merupakan bentuk degradasi dari kemajuan hubungan bilateral Kamboja dan UE. Hal tersebut akan merusak citra Kamboja di dunia internasional dan berdampak negatif pada ekonomi Kamboja yang berorientasi ekspor. Dengan mengenakan tarif baru pada barang-barang bernilai rendah, pasar domestik secara intrinsik akan menjadi kurang kompetitif, sehingga menyebabkan hilangnya sejumlah pekerjaan (Pouget, 2020). Selain itu, langkah UE akan menciptakan skeptisisme di Kamboja terkait kebijakan dari UE yang dinilai tidak adil.

Salah satu fakta yang menarik dari permasalahan ini yakni bahwa Kamboja merupakan negara pertama yang mengalami penarikan preferensi perdagangan di bawah skema EBA. Oleh karena itu, dengan merujuk pada latar belakang di atas dengan memfokuskan pada dinamika hubungan Kamboja dan Uni Eropa dalam kerangka inisiatif *Everything But Arms* (EBA), maka penulis

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “**Pengaruh Inisiatif *Everything But Arms* (EBA) terhadap Hubungan Kamboja – Uni Eropa**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu mulai tahun 2013 sampai 2020. Penulis menilai bahwa pada rentang waktu tersebut terjadi dinamika yang cukup krusial dalam hubungan Kamboja dan Uni Eropa dalam kerangka inisiatif *Everything But Arms* (EBA). Penelitian ini akan berfokus pada penerapan inisiatif EBA Uni Eropa di Kamboja sebagai negara penerima serta bagaimana pengaruh inisiatif tersebut terhadap hubungan bilateral Kamboja dan Uni Eropa. Adapun rumusan masalah yang disusun oleh penulis untuk memudahkan dalam menjabarkan hal-hal penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh inisiatif *Everything But Arms* (EBA) terhadap hubungan ekonomi Kamboja dan Uni Eropa?
2. Bagaimana dampak pemutusan inisiatif *Everything But Arms* (EBA) terhadap hubungan politik Kamboja dan Uni Eropa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh dari inisiatif *Everything But Arms* (EBA) Uni Eropa terhadap hubungan ekonomi Kamboja dan Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemutusan inisiatif *Everything But Arms* (EBA) terhadap hubungan politik Kamboja dan Uni Eropa.

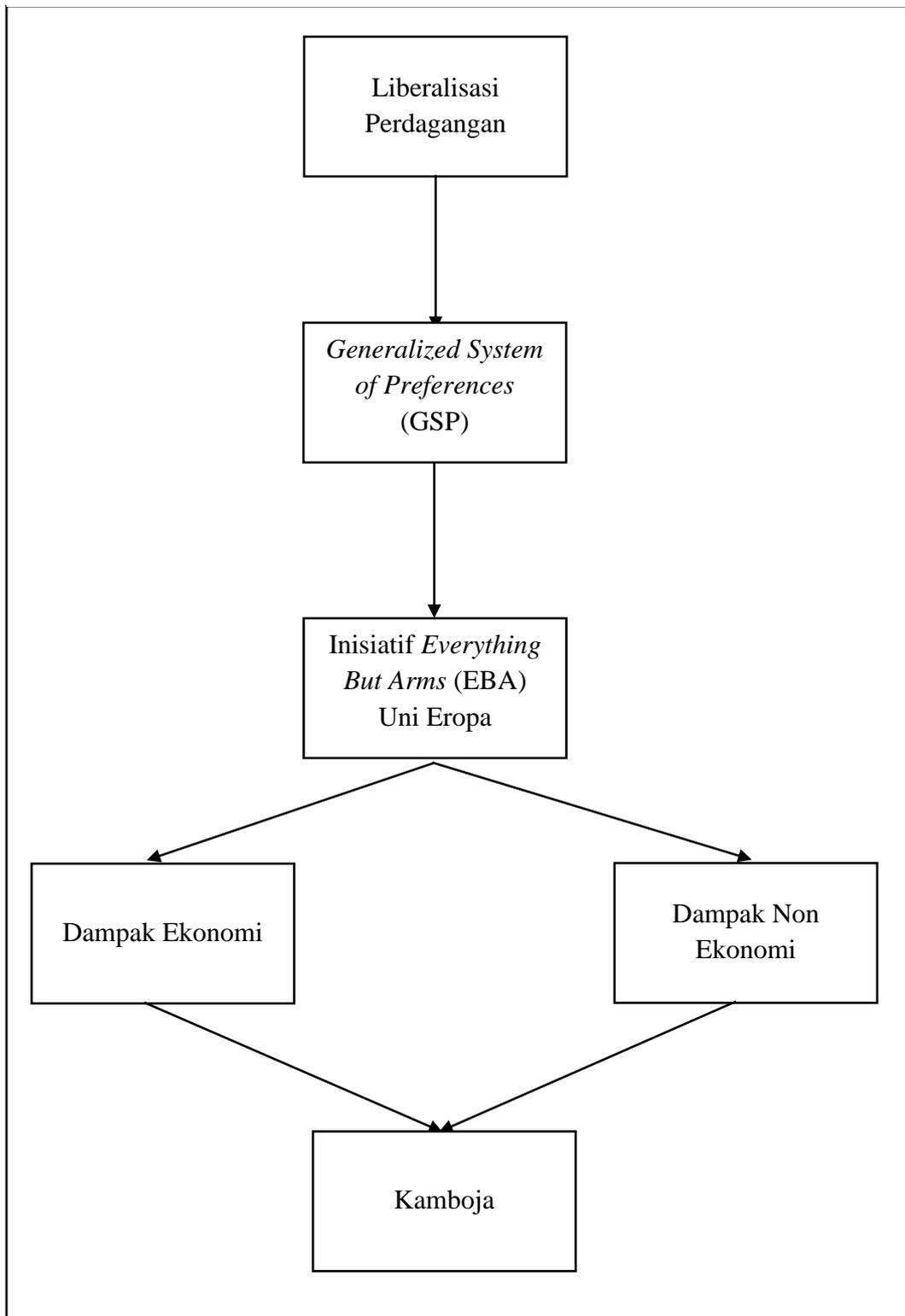
Dengan pencapaian tujuan tersebut, maka diharapkan pula kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi pengembangan disiplin hubungan internasional ke depannya, khususnya dalam kajian ekonomi politik internasional.
2. Menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para akademisi hubungan internasional dan masyarakat umum yang mempunyai ketertarikan untuk mengetahui pengaruh insiatif *Everything But Arms* (EBA) terhadap hubungan Kamboja dan Uni Eropa.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memperjelas mengenai apa yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini dan bagaimana hal tersebut dibahas, maka diperlukan adanya suatu kerangka konsep. Konsep yang akan digunakan dalam menganalisis serta mengkaji judul di atas adalah perdagangan internasional dengan berfokus pada liberalisasi perdagangan dan GSP.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Interpretasi Penulis, 2021

Perdagangan internasional bermula atas dasar tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat menghasilkan semua barang sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda dengan sumber daya alam negara lain. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional (Sari, 2019). Dimana negara-negara saling berdagang ketika mereka tidak memiliki sumber daya atau kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Dengan mengembangkan sumber daya domestiknya, negara dapat menghasilkan surplus dan memperdagangkannya untuk sumber daya yang mereka butuhkan.

Saat ini, perdagangan internasional adalah jantung dari ekonomi global dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap serangkaian perkembangan dan kemakmuran dunia dalam industri modern (Economics Online, n.d.). Secara umum, perdagangan internasional merupakan pertukaran barang atau jasa yang melintasi batas negara. Hal ini dapat berupa kegiatan ekspor dan impor produk yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, memenuhi permintaan yang ada, atau sebagai cara untuk mendiversifikasi keranjang ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional berkaitan erat dengan perkembangan globalisasi, dimana perpindahan barang melewati batas negara menjadi lebih cepat dan mudah.

Terdapat dua tipe dasar dari perdagangan internasional. Pertama, kondisi dimana negara penerima tidak dapat memproduksi barang atau menyediakan layanan yang dimaksud atau produksi dalam negeri tidak

mencukupi. Kedua, kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan untuk memproduksi barang atau memasok jasa, tetapi tetap mengimpornya. Jenis perdagangan kedua merupakan gambaran mayoritas perdagangan dunia saat ini dengan berbagai alasan yang kompleks mengapa hal tersebut terjadi.

Perdagangan internasional meliputi kebijakan perdagangan pada lingkup global, kegiatan ekspor dan impor, hambatan perdagangan, keuntungan dari perdagangan internasional, dan sebagainya. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang melandasi perdagangan internasional. Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri karena tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup atau dengan harga yang kompetitif di negara sendiri. Pada umumnya, alasan untuk mengimpor secara umum terbagi dalam tiga klasifikasi:

1. barang impor mungkin lebih murah daripada yang diproduksi di dalam negeri;
2. lebih banyak variasi barang yang dapat disediakan melalui impor;
3. barang impor mungkin menawarkan keuntungan yang lebih banyak, selain harga yang lebih rendah, bisa berupa kualitas atau desain yang lebih baik, status yang lebih tinggi (misalnya, label prestise), fitur teknis, dan lain-lain (Sherlock & Reuvid, 2004).

Kegiatan ekspor mengacu pada penjualan barang dan jasa dari negara asal ke negara lain. Kegiatan ini didorong oleh keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga dapat menciptakan efisiensi produksi dengan berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu dengan produksi skala besar. Sebagaimana dipercaya bahwa terdapat keuntungan dari perdagangan, ketika negara-negara

menjual barang dan jasa satu sama lain, pertukaran tersebut hampir selalu untuk keuntungan bersama (P. R. Krugman et al., 2018).

Salah satu komponen penting dari perdagangan internasional adalah reformasi perdagangan yang mengarah pada liberalisasi di bidang perdagangan. Dimana liberalisasi perdagangan dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi terpenting negara-negara di seluruh dunia (Nagy, 2020). Liberalisasi perdagangan mengacu pada pengurangan atau bahkan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, baik itu hambatan tarif dan non-tarif. Dimulai dengan keterbukaan ekonomi, liberalisasi perdagangan turut hadir sebagai sebuah kebijakan yang dapat ditempuh oleh suatu negara dan kini menjadi corak ekonomi perdagangan global.

Tujuan dari liberalisasi perdagangan terdapat pada peluang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan memperoleh keuntungan secara statis dan dinamis dari perdagangan melalui efisiensi alokasi sumber daya (Santos-Paulino & Thirlwall, 2004). Liberalisasi perdagangan diharapkan dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi dunia dan pengentasan kemiskinan, yang keduanya telah menjadi prioritas utama masyarakat internasional (Bouët, 2008). Dengan ini, liberalisasi perdagangan lebih menitikberatkan pada keuntungan terhadap negara berkembang. Salah satu implementasi dari liberalisasi perdagangan yaitu, *Generalized Scheme of Preferences* (GSP) sebagai bentuk kebijakan negara maju untuk membantu negara berkembang melalui perdagangan.

Konsep ini akan digunakan untuk membedah mengenai inisiatif *Everything But Arms* (EBA) sebagai bagian dari GSP yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Kamboja sebagai LDCs. Sebagaimana inisiatif tersebut menyangkut substansi dan implementasi kebijakan perdagangan dari Uni Eropa. Saat ini, kebijakan perdagangan adalah kewenangan eksklusif UE dan telah menjadi komponen fundamental dari kebijakan eksternal UE (Missiroli, 2017). Melalui perdagangan, UE dapat "mengeksport" nilai-nilainya ke mitra dagangnya. Sebagaimana UE sering mengkondisikan akses preferensial ke pasarnya untuk pencapaian *non-trade policy objectives* (NTPOs) seperti pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik. Selain melalui perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral, UE menggunakan instrumen utama kebijakan perdagangannya yaitu, *Generalized Scheme of Preferences* (GSP) untuk mendukung dan mempromosikan NTPOs (Borchert et al., 2020). Kebijakan perdagangan sepihak UE tersebut mencakup klausul persyaratan politik yang dapat digunakan UE untuk memengaruhi kebijakan domestik mitra dagangnya (Jørgensen et al., 2015).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penulis akan menguraikan masalah dengan memaparkan fakta-fakta yang ada untuk menggambarkan bagaimana peranan inisiatif EBA terhadap peningkatan ekspor garmen Kamboja ke UE pada tahun 2013-2020, lalu disertai dengan argumen yang relevan. Kemudian, hasil

uraian tersebut akan dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berbasis telaah pustaka (*library research*). Dalam hal ini, telaah pustaka yang dimaksud ialah dengan memngumpulkan data melalui literatur elektronik dan non-elektronik berupa buku, jurnal, dokumen, artikel, berita, surat kabar, tabloid, dan website yang valid.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Dalam hal ini, analisis data kualitatif ialah menganalisis permasalahan berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data dan menghubungkan seluruh fakta tersebut untuk menjadi landasan sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengguakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui orang lain atau dokumen-dokumen tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder ialah data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. sumber data sekunder merupakan data tertulis atau informasi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deduktif. Metode deduktif digunakan penulis untuk menggambarkan secara umum masalah yang diteliti. Kemudian, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik dalam menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas negara. Kegiatan ini timbul karena pada hakikatnya tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat menghasilkan semua barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya (Sari, 2019). Selain itu, mayoritas penyebab terjadinya perdagangan internasional yakni negara memiliki kemampuan yang berbeda untuk memproduksi barang tertentu jika dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang berbeda-beda ini pada gilirannya terkait dengan aspek-aspek yang mendasari produksi atau dengan kata lain, faktor-faktor produksi.

Pada dasarnya, negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional karena dua alasan dasar, yang masing-masing berkontribusi pada keuntungan mereka dari perdagangan. Pertama, negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Negara, seperti individu, dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan yang ada. Kedua, negara berdagang untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi. Artinya, jika setiap negara hanya memproduksi barang dalam jumlah terbatas, ia dapat memproduksi masing-masing barang tersebut dalam skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien daripada jika mencoba memproduksi semuanya (Krugman et al., 2018).

Secara global, perdagangan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dimana pada awal abad ke-21, negara-negara saling

terkait lebih erat dari sebelumnya melalui perdagangan barang dan jasa, aliran uang, dan investasi di ekonomi masing-masing. Arus perdagangan barang dan jasa internasional telah berkembang pesat dengan adanya globalisasi yang ditandai dengan penurunan biaya pengiriman dan komunikasi, pengurangan hambatan perdagangan pemerintah yang dinegosiasikan secara global, meluasnya *outsourcing* kegiatan produksi, dan kesadaran yang lebih besar terhadap orang, budaya dan produk asing (Krugman et al., 2018). Dapat dikatakan bahwa perdagangan barang secara internasional telah memberikan satu sumber pertumbuhan yang signifikan dari hubungan ekonomi antar negara.

Perdagangan internasional telah mengalami tiga perubahan struktural besar sejak tahun 1990-an. Perubahan pertama adalah 'servis' perdagangan. Dengan kata lain, jasa semakin banyak diperdagangkan lintas batas. Fenomena kunci kedua yang mempengaruhi perdagangan adalah globalisasi rantai nilai (atau produksi) perusahaan, di mana barang (dan jasa) diperdagangkan secara internasional. Perusahaan juga telah mengglobalisasikan rantai nilai mereka melalui *outsourcing* dan *offshoring*, dengan memangkas proses produksi dan menyebarkan kegiatan produksi di banyak negara, yang mengarah ke *Global Value Chains* (GVCs). GVC juga dibarengi dengan peningkatan investasi asing langsung, di mana perusahaan berinvestasi di luar negeri tidak hanya untuk mencari pasar baru tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasi. Perubahan struktural ketiga pada perdagangan internasional dalam 20 tahun terakhir adalah meningkatnya digitalisasi ekonomi dan peningkatan yang terkait dalam perdagangan elektronik dan aliran data lintas batas. Tiga perubahan struktural

yang disebutkan di atas telah mendorong kebijakan perdagangan untuk semakin fokus pada pengurangan hambatan regulasi perdagangan dan investasi. Selama dua dekade terakhir, negosiasi perdagangan baik bilateral, plurilateral atau multilateral semakin berfokus pada hambatan perdagangan di luar perbatasan (Leblond & Viju-Miljusevic, 2019).

Perekonomian global yang diciptakan oleh keterkaitan ini adalah tempat yang bergejolak dimana pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis di setiap negara, sekarang harus memperhatikan apa yang terkadang dengan cepat mengubah kondisi ekonomi di belahan dunia lain. Perdagangan internasional kira-kira tiga kali lipat pentingnya dibandingkan dengan perekonomian secara keseluruhan. Mungkin satu-satunya pemahaman yang paling penting dalam semua ekonomi internasional adalah bahwa terdapat keuntungan dari perdagangan yaitu, ketika negara-negara menjual barang dan jasa satu sama lain, pertukaran ini hampir selalu untuk keuntungan bersama. Kisaran keadaan dimana perdagangan internasional menguntungkan jauh lebih luas daripada yang dibayangkan kebanyakan orang (Krugman et al., 2018).

Dengan kata lain, dua negara dapat berdagang untuk keuntungan bersama bahkan ketika salah satu dari mereka lebih efisien daripada yang lain dalam memproduksi segala sesuatu dan ketika produsen di negara yang kurang efisien dapat bersaing hanya dengan membayar upah yang lebih rendah. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam memproduksi rentang barang yang lebih sempit, sehingga memberi mereka efisiensi yang lebih besar dari produksi skala besar (Krugman et al.,

2018). Melalui pertukaran barang yang tidak terkendali dengan semua keuntungan yang diperoleh, setiap negara pada akhirnya memproduksi barang-barang yang secara alami paling baik, dibandingkan dengan negara dan produk lain, dan semua negara yang berpartisipasi di dalamnya (Gomory & Baumol, 2018).

Teori perdagangan internasional seyogyanya memberikan wawasan tentang mekanisme perdagangan internasional dan penentu pola perdagangan, serta interaksi dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi (Zhang, 2008). Teori ini pada dasarnya berkaitan dengan penyebab, struktur dan volume perdagangan internasional (yaitu, barang apa yang diekspor, mana yang diimpor, dan mengapa, oleh setiap negara); keuntungan dari perdagangan internasional dan bagaimana keuntungan ini didistribusikan; penentuan harga relatif barang dalam perekonomian dunia; spesialisasi internasional; pengaruh tarif, kuota dan hambatan lain untuk berdagang; pengaruh perdagangan internasional pada struktur produksi dan konsumsi dalam negeri; pengaruh pertumbuhan ekonomi domestik pada perdagangan internasional dan sebaliknya; dan seterusnya. Ciri khas dari teori perdagangan internasional adalah asumsi bahwa perdagangan terjadi dalam bentuk barter (Gandolfo, 2014).

Landasan teori perdagangan internasional terdapat dalam tiga model utama yang bertujuan menjelaskan determinan perdagangan internasional dan spesialisasi yaitu, sebagai berikut.

1. Teori klasik (Torrens-Ricardo), yang menurutnya faktor penentu perdagangan internasional dapat ditemukan dalam perbedaan teknologi antar negara (Gandolfo, 2014). Teori ini menekankan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar (Salvatore, 2014). Karena terdapat manfaat ekonomi bagi suatu negara untuk mengkhususkan diri atau spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan relatif, dan menukarnya dengan produk negara yang memiliki keunggulan dalam jenis produk tertentu (Sherlock & Reuvid, 2004). Keunggulan komparatif ialah suatu negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang berharga murah daripada negara lain. Keunggulan komparatif berdasarkan pada perbandingan biaya produksi untuk barang serupa di kedua negara (Sari, 2019).
2. Teori Heckscher-Ohlin, yang menekankan perbedaan *endowment* yang menjadi faktor penentuan mengapa tiap negara menjadi berbeda dalam hal produksi dan melakukan perdagangan internasional (Gandolfo, 2014). Dikatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan barang yang paling efisien dengan menggunakan *endowment* yang dimilikinya secara melimpah. Jadi, negara kaya akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang padat modal seperti mesin atau produk berteknologi tinggi. Negara-negara yang memiliki banyak lahan cenderung menjadi pengekspor pertanian, sementara negara-negara yang memiliki tenaga kerja tidak terampil yang melimpah akan fokus pada produksi dan ekspor barang-

barang konsumsi seperti pakaian dan barang-barang manufaktur sederhana (Martin, 2015). Teori ini juga menyatakan perbedaan produktivitas disebabkan perbedaan kuantitas atau jumlah faktor produksi yang dimiliki suatu negara sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Negara yang memiliki banyak faktor produksi mengakibatkan biaya produksinya murah sehingga akan mengekspor hasil produksinya. Sementara itu, negara yang memiliki sedikit faktor produksi, akan mengimpor barang tertentu (Sari, 2019).

3. Teori neoklasik, yang menekankan bahwa faktor determinan dalam perdagangan internasional dapat ditemukan secara bersamaan dalam perbedaan antara teknologi, dukungan faktor, dan selera dari berbagai negara. Unsur terakhir menjelaskan kemungkinan adanya perdagangan internasional, bahkan jika teknologi dan faktor pendukung sama sekali identik antar negara. Kita melihat dalam konteks teori klasik bahwa perdagangan internasional bermanfaat sejauh memungkinkan suatu negara memperoleh komoditas dengan biaya lebih rendah daripada biaya produksi dalam negeri atau. Kesimpulan serupa berlaku dalam teori neoklasik (Gandolfo, 2014).

Perdagangan internasional memberikan manfaat dalam rangka memperoleh harga barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar-pasar industri dalam negeri, dan meningkatkan penggunaan teknologi modern untuk menambah

produktivitas (Sukirno, 2016). Ketika negara-negara berdagang satu sama lain, mereka tidak perlu lagi swasembada dan dapat mengkhhususkan diri dalam memproduksi barang yang mereka buat secara lebih efisien daripada barang lain; yaitu, pada barang dimana mereka memiliki keunggulan komparatif. Proses spesialisasi menghasilkan peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan agregat untuk semua negara, sesuai dengan asumsi dari teori keunggulan komparatif (Martin, 2015).

Keuntungan yang diperoleh kedua negara dalam berdagang dikenal dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena melakukan spesialisasi produksi barang memiliki harga relatif/dasar tukar domestik lebih rendah dari negara lain (Sukirno, 2016). Dengan adanya perdagangan internasional, maka diharapkan terdapat keuntungan dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun politik sehingga mampu meningkatkan perekonomian di dalam negeri (Sari, 2019). Dengan kata lain, perdagangan internasional merupakan salah satu aspek krusial dari keseluruhan aktivitas ekonomi negara.

Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional (Sari, 2019).

1. Faktor pendorong perdagangan internasional:
 - a. adanya kebutuhan barang dan/atau jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam mengolah sumber daya ekonomi;

- c. adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha;
 - d. adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi;
 - e. adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu;
 - f. keinginan menjalin kerja sama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain;
 - g. berkembangnya globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dunia;
 - h. kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional.
2. Faktor penghambat perdagangan internasional:
- a. nilai tukar yang berbeda;
 - b. kebijakan ekonomi internasional;
 - c. adanya konflik di suatu negara;
 - d. kegiatan ekspor impor perlu waktu lama;
 - e. kualitas sumber daya manusia yang rendah;
 - f. adanya organisasi ekonomi regional yang menguntungkan negara anggota;
 - g. adanya kebijakan pembatasan produk.

Membuka perekonomian untuk berdagang dengan negara lain, memberikan potensi keuntungan bagi semua, karena memungkinkan adanya spesialisasi yang mengarah pada tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih

tinggi, memperbesar pasar, dan meningkatkan cakupan pilihan konsumen. Namun, proses spesialisasi memerlukan pemindahan aset yang mahal bagi beberapa aktor, dan eksposur ke perekonomian global dapat menciptakan sumber risiko baru. Karena alasan ini, perdagangan sangat dipolitisasi. Tidak ada pemerintah dalam sistem negara modern saat ini yang pernah melakukan pendekatan lepas tangan terhadap kebijakan perdagangan (Martin, 2015).

Dalam perspektif ekonomi politik, masalah perdagangan internasional selalu terkait dengan variabel politik. Artinya, perdagangan internasional bukanlah suatu arena yang bersifat eksklusif. Setidaknya perdagangan internasional selalu kait mengait dengan politik, meskipun keterkaitan itu kadang sangat kuat dan tidak jarang agak longgar (Bakry, 2015). Keterkaitan ekonomi dan politik dalam perdagangan internasional terejawantahkan dalam kebijakan perdagangan tiap aktor yang tidak terlepas dari pertimbangan politik. Hal tersebut juga termanifestasi pada Uni Eropa (UE) yang merupakan salah satu aktor yang aktif terlibat dalam perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangannya yang turut dipolitisasi. Sebagai bagian dari EU's External Action, kebijakan perdagangan UE berdasar pada prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Bab 1 Judul V dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU): demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Ini berarti bahwa kebijakan perdagangan UE lebih dari sekedar tentang liberalisasi ekonomi (Leblond & Viju-Miljusevic, 2019). Kebijakan perdagangan UE juga digunakan sebagai alat untuk mempromosikan

dan “mengekspor” prinsip-prinsip dan nilai-nilai Eropa, dari demokrasi dan hak asasi manusia hingga hak lingkungan dan sosial (European Council, n.d.).

Orientasi kebijakan perdagangan UE dalam perdagangan internasional juga tercermin pada kebijakan preferensi perdagangan yang diberikan oleh UE dalam upayanya untuk membantu negara berkembang melalui perdagangan. Melalui *Generalized System of Preferences* (GSP), UE turut mengekspor nilai-nilai fundamental yang dianutnya kepada negara-negara penerima. Memberikan persyaratan yang bersifat politis dalam kebijakan perdagangannya, yang salah satunya ditujukan pada Kamboja sebagai negara penerima. Kamboja juga sangat terbuka terhadap perdagangan internasional sejak terintegrasinya Kamboja ke perdagangan global yang turut didukung oleh keanggotaannya di ASEAN pada tahun 1999 dan WTO sejak 2004. Dengan komitmen tersebut, Kamboja mulai mereformasi sistem hukum dan peraturannya seperti hak kekayaan intelektual, aturan kesehatan, hambatan non-tarif untuk perdagangan, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala, termasuk masalah tata kelola dan kurangnya transparansi. Kamboja juga mengalami kendala logistik dan infrastruktur (Société Générale, 2021).

B. Liberalisasi Perdagangan

Pada dasarnya liberalisasi perdagangan mensyaratkan adanya penghapusan restriksi perdagangan yaitu penghapusan atau pengurangan terhadap pajak ekspor dan pajak impor. Selain itu, istilah ini menggambarkan proses di mana negara-negara bernegosiasi dan menyetujui aturan perdagangan internasional yang semakin ketat dan lebih luas (George, 2010). Salah satu

tujuan dari liberalisasi perdagangan terdapat pada peluang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan memperoleh keuntungan secara statis dan dinamis dari perdagangan melalui efisiensi alokasi sumber daya yang lebih (Santos-Paulino & Thirlwall, 2004). Liberalisasi perdagangan diharapkan dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi dunia dan pengentasan kemiskinan, yang keduanya telah menjadi prioritas utama masyarakat internasional (Bouët, 2008).

Proses liberalisasi perdagangan pada perekonomian dunia ditandai dengan terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. GATT telah memainkan peran penting dalam menyelaraskan aturan tentang perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO), penerus GATT, selanjutnya telah memberikan dorongan pada gagasan tentang penghalang interaksi ekonomi dan komersial yang bebas antar negara. Reformasi pada dekade 1980-an dan 1990-an adalah asal mula ekspansi yang kuat dalam perdagangan internasional. Negara berkembang sekarang lebih terintegrasi dengan ekonomi dunia daripada negara berpenghasilan tinggi. Pada awal 1990-an, peneliti dan pembuat kebijakan secara umum menerima keunggulan orientasi ke luar atas substitusi impor sebagai strategi pembangunannya. Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan meluas pada dekade 1990-an, yang mengarah pada peningkatan integrasi ekonomi dalam perdagangan dunia. Jatuhnya komunisme di Eropa Tengah dan Timur, bersama dengan runtuhnya bekas Uni Soviet, memperkuat pandangan ini. Negara-negara yang belum memulai liberalisasi mulai melakukannya, sementara yang lain

meningkatkan upaya mereka. Hampir semua ekonom setuju bahwa meliberalisasi perdagangan penting untuk pertumbuhan dalam jangka Panjang (World Bank, 2005).

Liberalisasi perdagangan, dalam beberapa dekade terakhir, telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi terpenting negara-negara di seluruh dunia (Nagy, 2020). Para ekonom perdagangan menyebut setiap hambatan perdagangan bebas sebagai distorsi perdagangan, yang harus dihilangkan jika hasil dari pasar yang sempurna ingin dicapai. Liberalisasi perdagangan juga memiliki manfaat teoretis lainnya. Penghapusan hambatan perdagangan menghasilkan peningkatan perdagangan, sehingga dengan terus menerus mengurangi hambatan akan menghasilkan perdagangan yang terus meningkat. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global, selama semua hambatan dihilangkan (George, 2010).

Liberalisasi terhadap perdagangan telah menjadi elemen sentral dari strategi pertumbuhan yang sukses. Di semua negara yang telah mempertahankan pertumbuhan, pangsa perdagangan produk domestik bruto (PDB) telah meningkat dan hambatan perdagangan telah berkurang. Reformasi perdagangan dalam bentuk liberalisasi kemungkinan besar akan merangsang pertumbuhan jika menjadi bagian dari strategi yang komprehensif. Unsur-unsur penting dari strategi pertumbuhan yang efektif dapat mencakup pembangunan pengelolaan makroekonomi yang baik dari infrastruktur dan lembaga terkait perdagangan dan investasi ekonomi secara luas dalam modal fisik dan manusia,

akses yang lebih besar ke pasar negara maju dan berkembang, dan pemeliharaan aturan hukum yang baik (World Bank, 2005).

Penelitian yang berfokus pada hubungan antara reformasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di tahun 1990-an juga menemukan bahwa reformasi perdagangan dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, liberalisasi perdagangan saja tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan kemungkinan besar akan dikaitkan dengan hasil positif ketika dilaksanakan dalam lingkungan ekonomi yang menguntungkan, dan di negara-negara dengan regulasi yang efektif, dampak dari reformasi perdagangan adalah positif untuk pertumbuhan. Salah satu jalan penting di mana penurunan tarif pada tahun 1990-an berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi adalah melalui dampaknya terhadap ekspor. Penurunan tarif secara positif dan signifikan terkait dengan pangsa ekspor negara-negara berkembang. Dimana pengurangan tarif mendorong ekspor. Selain itu, faktor penentu kegiatan ekspor lainnya adalah eksistensi perusahaan manufaktur yang beralih ke kegiatan ekspor. Dimana perusahaan manufaktur yang beralih ke kegiatan ekspor seringkali paling produktif dalam suatu perekonomian. Akibatnya, kebijakan yang mendorong investasi dalam modal manusia dan fisik, dan yang mendukung perubahan teknologi, kemungkinan besar akan mendorong pertumbuhan ekspor (World Bank, 2005).

Beberapa negara telah mencapai integrasi yang lebih besar dan pertumbuhan yang kuat dengan mengadopsi reformasi perdagangan unilateral atau multilateral yang dikombinasikan dengan partisipasi dalam perjanjian

perdagangan regional. Menandatangani perjanjian perdagangan regional memberi negara akses ke pasar sesama anggota, dan dapat membantu meningkatkan institusi domestik mereka. Salah satu contoh dari integrasi regional yang telah membuahkan hasil yang baik adalah eksistensi UE sebagai organisasi regional bagi negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang menandatangani Perjanjian Eropa pada tahun 1990-an. Untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur, aspek harmonisasi kelembagaan dari Perjanjian Eropa sangat penting untuk integrasi perdagangan dan pertumbuhan yang berhasil. Perjanjian mengenai harmonisasi kebijakan investasi, aturan regulasi, dan institusi dengan anggota UE telah mendorong foreign direct investment (FDI) yang berorientasi ekspor ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur (World Bank, 2005).

Dampak langsung dari liberalisasi perdagangan yakni peningkatan integrasi, pertumbuhan perdagangan, dan penurunan angka kemiskinan. Jika membuka diri terhadap perdagangan dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, hal itu juga dapat dikaitkan dengan penurunan kemiskinan. Argumen ini berdasar pada dua asumsi yaitu, pertama bahwa membuka diri terhadap perdagangan mengarah pada pertumbuhan yang lebih tinggi dan kedua, bahwa pertumbuhan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Terdapat bukti luas bahwa pertumbuhan PDB mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, bukti menunjukkan bahwa pertumbuhan menguntungkan mereka yang berada di ujung bawah distribusi pendapatan. Terdapat beberapa bukti bahwa suatu negara yang membuka diri terhadap investasi asing dikaitkan dengan penurunan

kemiskinan. Begitupun dengan peningkatan kegiatan ekspor dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan terhadap tenaga kerja, undang-undang, dan penurunan kemiskinan (World Bank, 2005).

Ketika meliberalisasi ekonomi, keuntungan kesejahteraan berasal dari dua sumber utama: keuntungan efisiensi alokatif dan keuntungan nilai tukar perdagangan. Reformasi perdagangan suatu negara menjelaskan yang pertama dimana dengan menghapus tarif impor, surplus konsumen meningkat dan faktor-faktor produktif dialokasikan dengan lebih efisien. Keuntungan ini diperoleh terlepas dari apa yang dilakukan mitra dagang. Keuntungan *terms-of-trade* dapat dicapai dengan menaikkan harga ekspor dan/atau menurunkan harga impor. Peningkatan akses ke pasar luar negeri berkontribusi pada yang pertama (Bouët, 2008).

Banyak ekonom berharap bahwa negara berkembang dengan keunggulan komparatif dalam tenaga kerja tidak terampil akan mendapatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan melalui peningkatan permintaan untuk mereka. Barang padat karya tidak terampil, yang pada gilirannya akan mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Para penerima upah yang rendah di sektor-sektor ekspor atau di sektor-sektor dengan investasi asing yang masuk memperoleh keuntungan dari reformasi perdagangan dan investasi. Sebaliknya, pekerja di sektor-sektor yang sebelumnya dilindungi kemungkinan besar akan rugi (World Bank, 2005).

Reformasi perdagangan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka yang tidak terampil di negara-negara dengan keunggulan komparatif

dalam memproduksi barang-barang intensif tanpa keterampilan. Kurangnya liberalisasi dalam jasa tenaga kerja sangat merugikan negara-negara berkembang, yang keunggulan komparatifnya terletak pada ekspor jasa padat karya berketerampilan menengah dan rendah (World Bank, 2005). Bukti menunjukkan bahwa untuk negara berkembang, penandatanganan perjanjian perdagangan regional dengan negara maju adalah yang paling berguna. Kesepakatan juga harus berusaha untuk memastikan bahwa hambatan yang berlaku untuk negara yang tidak setuju tetap rendah. Penandatanganan perjanjian semacam itu tidak akan menghasilkan respons ekspor dan pertumbuhan yang positif kecuali negara-negara itu sendiri juga mengejar reformasi ekonomi, politik, dan sosial lainnya yang diperlukan (McMillan et al., 2002).

Pada dasarnya, reformasi perdagangan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara proporsional lebih tinggi untuk negara-negara berkembang, terutama untuk LDCs, meskipun bagian mereka dalam peningkatan kesejahteraan dunia secara keseluruhan lebih kecil. Tingkat perubahan kesejahteraan dua kali lebih besar untuk LDC dibandingkan negara berpenghasilan menengah dan lebih dari dua kali lebih besar dibandingkan negara kaya. Dalam pengertian ini, liberalisasi penuh adalah ramah pembangunan. Akan tetapi, hasil ini tidak berarti bahwa setiap negara berkembang mendapatkan keuntungan yang sama dari tingkat perubahan kesejahteraan yang lebih tinggi ini (Bouët, 2008).

Setelah reformasi pada tahun 1990-an, sistem perdagangan dunia lebih mendukung pembangunan. Akan tetapi, pasar global justru paling tidak ramah terhadap produk yang diproduksi negara berkembang seperti pertanian, tekstil, dan manufaktur padat karya. Peningkatan tarif dan pengaturan kuota yang dipertahankan oleh negara maju dan berkembang secara sistematis menolak akses pasar yang buruk dan memberikan insentif yang tidak tepat terhadap nilai tambah di negara-negara berkembang. Baik di negara maju maupun berkembang, perlindungan tetap sangat terkonsentrasi di area yang paling sensitif secara politik — tekstil, pakaian, manufaktur padat karya lainnya, dan pertanian. Perlakuan berbeda oleh negara maju masih menjadi kendala ekspansi perdagangan oleh negara berkembang, khususnya yang paling miskin. Di negara maju, tarif rata-rata yang relatif rendah menutupi perlindungan yang terkadang tinggi dalam bentuk kenaikan tarif, bea khusus, dan subsidi produksi (World Bank, 2005).

Untuk melanjutkan momentum menuju integrasi global yang lebih besar, negara-negara berpenghasilan tinggi harus lebih membuka pasar mereka untuk ekspor negara berkembang. Perlakuan tarif negara-negara industri yang tidak adil terhadap negara-negara berkembang telah dikonsolidasikan dalam forum multilateral dari WTO. Salah satu bentuk diferensiasi akses pasar yaitu, adanya perlakuan khusus untuk negara-negara miskin dalam mengakses pasar negara maju dalam bentuk preferensi perdagangan non-resiprokal (World Bank, 2005). Preferensi perdagangan non-resiprokal tersebut seringkali disebut dengan *Generalized System of Preferences* (GSP). Dengan memberikan

pengurangan atau bahkan penghapusan tarif terhadap negara-negara berkembang, GSP merupakan salah satu bentuk dari liberalisasi perdagangan yang menitikberatkan pada hubungan negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan internasional. Model liberalisasi perdagangan ini juga terimplementasi dalam hubungan UE dan Kamboja.

C. *Generalized System of Preferences (GSP)*

Konsep *Generalized System of Preferences (GSP)* pada dasarnya terdiri dari preferensi tarif non-timbal balik yang diberikan oleh semua negara maju kepada produk dari semua negara berkembang. GSP berjanji melalui "*trade for aid*" untuk meningkatkan ekspor dan daya beli negara berkembang dalam jangka pendek dan untuk mendiversifikasi ekonomi negara paling kurang berkembang atau *Least Developed Countries (LDCs)* dalam jangka panjang dengan mendorong ekspor manufaktur dan semi-manufaktur yang diproduksi (Graham, 1978). Dengan kata lain, GSP memberikan akses pasar preferensial satu arah bagi negara berkembang ke pasar negara maju.

Menurut Kamus Hubungan Internasional oleh Khasan Ashari, GSP merupakan sistem yang ditetapkan untuk mengecualikan negara-negara miskin dari prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, khususnya prinsip *most favoured nations (MFN)*. Sistem ini memungkinkan pemberlakuan tarif yang lebih rendah bagi negara-negara berkembang. Tujuan pemberlakuan GSP adalah untuk: (1) meningkatkan pendapatan ekspor negara-negara berkembang; (2)

mempromosikan industrialisasi; dan (3) meningkatkan diversifikasi ekonomi (Ashari, 2015).

Konsep dan program GSP dibuat berdasarkan premis bahwa tarif preferensial di pasar negara maju dapat mendorong pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor di negara berkembang. Hal ini diyakini, pada gilirannya, akan membantu membebaskan penerima manfaat dari ketergantungan yang besar pada perdagangan produk primer (misalnya bahan mentah), dan membantu mendiversifikasi ekonomi mereka untuk mendorong pertumbuhan yang stabil (OECD Secretary-General, 1983). Preferensi ini harus digeneralisasikan, yaitu tersedia untuk semua negara berkembang dan tidak lagi terbatas pada negara yang memiliki hubungan istimewa dengan negara industri tertentu (Zhou & Cuyvers, 2012).

GSP adalah salah satu dari sedikit instrumen kebijakan perdagangan negara-negara industri yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan pendapatan ekspor bagi negara-negara berkembang. Prinsip dasarnya adalah pemberian perlakuan tarif preferensial, yang dalam banyak kasus, terdiri dari pembebasan total atau sebagian dari pembayaran bea masuk atas produk industri (dengan pengecualian tertentu) dan produk pertanian tertentu yang berasal dari negara penerima. Perlakuan ini tunduk pada pengecualian dan kondisi yang umumnya berbeda dari satu skema ke skema lainnya. Pada saat yang sama, semua skema ini memiliki kesamaan fitur yaitu memiliki jenis klausul perlindungan yang berbeda, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peningkatan yang tajam atau signifikan dalam impor produk tertentu,

yang berasal dari satu atau lebih negara penerima, tidak mengarah pada sebuah "*market disruption*" di negara pemberi preferensi (Arnau, 2010).

GSP adalah instrumen khusus yang berfokus pada satu dimensi saja: preferensi tarif untuk perdagangan barang. Ia tidak memiliki ambisi atau kemungkinan untuk mengatasi masalah lain yang dihadapi oleh negara berkembang. Hanya campuran kebijakan yang jauh lebih luas yang dapat mengatasi masalah kompleks tersebut (European Commission, 2014). GSP terdiri dari sejumlah skema non-homogen yang ditetapkan oleh negara-negara maju, yang memberikan berbagai jenis preferensi tarif untuk produk yang diimpor dari negara berkembang. Dasar hukum GSP adalah struktur kompleks dari resolusi PBB yang bersifat *non-binding*, keputusan GATT dan WTO, dan undang-undang nasional, yang bahkan lebih kompleks dalam kasus Uni Eropa (UE) karena kebijakan perdagangan merupakan tanggung jawab Komisi Eropa (Arnau, 2010).

Awalnya fasilitas ini diajukan ke sidang GATT sebagai alat untuk mengatasi adanya ketimpangan daya saing antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang diperkenankan menerima kemudahan berupa pengenaan tarif bea masuk lebih rendah daripada tarif normal, MFN, dari negara-negara maju (Rahadian et al., 2017). Pada tahun 1965, Pihak GATT menambahkan Bagian IV ke Perjanjian Umum, suatu amandemen yang mengakui kebutuhan ekonomi khusus negara berkembang dan menegaskan prinsip *nonreciprocity*. Berdasarkan prinsip ini, negara maju dapat mengabaikan penerimaan manfaat timbal balik atas

komitmen yang dinegosiasikan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif dan pembatasan perdagangan di negara berkembang. Pada bulan Juni 1971, diputuskan melalui GATT untuk memberikan negara-negara maju pembebasan dari Pasal I (aturan nondiskriminasi) untuk memungkinkan mereka memperkenalkan apa yang disebut sebagai GSP (Grimwade, 1996).

Skema GSP dimulai pada 1960-an dengan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Pada konferensi pertamanya pada tahun 1964, sekelompok negara kurang berkembang yang dikenal sebagai Kelompok 77, mengeluarkan resolusi yang menyerukan perubahan dalam tatanan ekonomi internasional, termasuk penurunan tarif barang yang berasal dari negara berkembang. Pada konferensi UNCTAD kedua tahun 1968, dicapai kesepakatan tentang skema pemberian preferensi tarif impor dari negara berkembang. Pengabaian tahun 1971 mengesahkan program GSP pada awalnya untuk jangka waktu sepuluh tahun, dengan syarat bahwa preferensi yang diberikan kepada satu negara berkembang diperluas ke semua (Grimwade, 1996). GSP dijelaskan dalam keputusan tersebut sebagai "sistem preferensi umum, non-timbal balik dan non-diskriminatif yang bermanfaat bagi negara berkembang."

Hal yang unik dari GSP adalah, meskipun wajib untuk diadopsi oleh negara-negara maju, akan tetapi memberikan kebebasan bagi masing-masing negara yang mengadopsi untuk menentukan *beneficiaries* serta *product list* sendiri (Rahadian et al., 2017). Negara berkembang yang menerima preferensi GSP dipilih berdasarkan kebijaksanaan negara maju yang menerapkannya

(Martin, 2015). Dengan kata lain, skema GSP yang ditawarkan oleh berbagai negara donor dan aturan asal mereka berbeda secara mendasar. Pengaturan khusus juga telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan LDCs, seperti pada sub-skema GSP UE yang dikenal sebagai *Everything But Arms* (EBA).

Preferensi perdagangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspor negara berkembang ke pasar ekspor utama. Dimana selama bertahun-tahun, GSP telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang memungkinkan bagi negara-negara berkembang (UNCTAD, n.d.). Sejak tahun 1971, GSP telah menjadi bagian penting dalam kebijakan perdagangan negara maju (Kennedy, 2011). Dimana GSP merupakan salah satu pilar dari rezim perdagangan global yang mengatur perdagangan antara negara Utara-Selatan. Pada pertengahan 1970-an, sebagian besar negara maju telah menawarkan program semacam itu (Martin, 2015).

GSP dan Rezim Preferensial Non-Timbal Balik lainnya mengandalkan konsep "*trade for aid*". Sejak tahun 1970-an, "*trade for aid*" telah dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk mempromosikan pembangunan daripada pendanaan proyek (Easterly, 2003). Melalui pendapatan ekspor tambahan yang dihasilkan, GSP mendorong pertumbuhan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang (European Commission, 2014). GSP mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara-negara penerima dengan membantu negara-negara ini meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan mereka. Selain itu, GSP juga memberikan peluang bagi banyak negara termiskin di dunia untuk

menggunakan perdagangan guna menumbuhkan ekonomi mereka dan keluar dari kemiskinan (USTR, n.d.).

Meskipun GSP dan skema terkait bersifat preferensial dan tidak memerlukan konsesi perdagangan timbal balik, mereka sama sekali tidak bersifat *nonreciprocal* atau tanpa syarat. Negara-negara maju memiliki kebijakan yang hampir sepenuhnya terkait dengan desain dan implementasi skema ini. Hampir semua aspek desain dan implementasi skema — produk mana yang dicakup, seberapa besar kuota, syarat apa (jika ada) yang diberlakukan, prosedur apa yang digunakan untuk mengesampingkan syarat, dan sebagainya — ditentukan oleh negara pengimpor. Kelayakan sering kali secara eksplisit dikaitkan dengan berbagai kriteria politik (Martin, 2015). Salah satu aktor yang memberlakukan GSP terhadap negara-negara berkembang adalah UE. Dengan persyaratan yang diberikan menyangkut kriteria politik yang harus dipenuhi oleh negara berkembang.

Penerapan program GSP pada tahun 1971 merupakan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan dan pembangunan Komisi Eropa pada awal tahun 1970-an tersebut. Peraturan GSP UE saat ini mengatur tiga 'pengaturan' yaitu, pengaturan umum yang mengatur pengurangan bea, pengaturan insentif khusus untuk pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik yang menyediakan izin masuk bebas bea, dan pengaturan khusus untuk negara-negara kurang berkembang yang juga mengatur bebas bea masuk. Ada juga sejumlah mekanisme untuk menarik preferensi atas dasar ekonomi dan non-ekonomi

tertentu (Bartels, 2007). Hal tersebut bergantung pada kebijakan dan prosedur UE yang tentu tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politiknya.